

Demokrasi Sebagai Cara Hidup*

Terdapat *kekacauan* mengenai arti demokrasi. Perbedaan-perbedaan mengenai konsep itu bukan semata-mata semantik, melainkan lebih mendalam sifatnya. Bila wakil-wakil Amerika, Inggris dan Perancis berbicara mengenai demokrasi, yang mereka maksud adalah lawan apa yang dipikirkan seorang komunis Soviet atau Cina apabila ia menggunakan istilah yang sama. Pada akhir Perang Dunia II misalnya, ketika Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet menduduki Jerman, salah satu tujuan pokok mereka ialah *demokratisasi Jerman*. Mula-mula keempat negara itu setuju mengenai tujuan itu, tetapi segera menjadi jelas bahwa konsep Soviet sama sekali berbeda dengan pengertian demokrasi Amerika, Inggris dan Perancis.

Negara-negara Barat berpendapat bahwa memasukkan demokrasi ke Jerman berarti pemilihan bebas; pers bebas; kebebasan perkumpulan politik; kebebasan beragama, pikiran dan bicara; persamaan di depan hukum; hak untuk melawan pemerintah; hak untuk memilih pekerjaan; hak untuk membentuk serikat buruh bebas; hak untuk bergerak dengan leluasa dalam negara, pergi ke luar negeri untuk sementara waktu, atau beremigrasi secara permanen; dan secara umum hak setiap orang untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mental dan moralnya selengkap mungkin. Di atas segala sesuatu, *kebebasan dari ketakutan* adalah pokok dalam konsep demokrasi Barat. Tiada masyarakat yang bisa disebut demokratis kalau para warga negaranya tidak merasa aman dari campur tangan yang tidak sah dalam urusan mereka oleh instansi-instansi pemerintah. Segi demokrasi ini paling baik dilukiskan sebagai berikut: di suatu negara bebas, ketukan pintu pagi buta berarti bahwa tukang susu tiba; di suatu negara totaliter, ketukan yang

*Diambil dari William Ebenstein, *Today's ISMS: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism* (Englewood Cliffs, 1967), hal. 139-151, oleh Kirdi DIRAJUDJO

sama bisa berarti bahwa polisi rahasia di situ, untuk mengambil seorang dari rumah dan keluarganya dan memenjarakan, mengasingkan atau membunuhnya tanpa proses pengadilan yang wajar.

Konsepsi komunis sebagai demokratisasi Jerman sama sekali berbeda dengan konsepsi Barat. Pertama, bila seorang komunis bicara tentang demokrasi, yang dimaksud bukan pemerintah rakyat, juga bukan pemerintahan oleh rakyat, tetapi seperti dikatakan oleh seorang filsuf Soviet terkemuka, "apakah kebijaksanaan ini atau itu dilaksanakan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan mayoritas besarnya atau demi kepentingan minoritasnya" (G.F. Alexandrov, *The Pattern of Soviet Democracy*, 1948).

Orang-orang komunis menyebutkan pokok-pokok demokrasi -- kebebasan bicara, pers dan perkumpulan, persamaan di depan hukum dan semua hak demokrasi pokok lainnya -- demokrasi *formal*, sebagai lawan demokrasi *nyata* kaum komunis, di mana sarana-sarana produksi adalah milik negara. Dalam konsepsi komunis, kebebasan-kebebasan demokratis yang tradisional mendapat suatu arti baru.

Dari ilustrasi di atas jelas mengalir *ciri-ciri pokok* konsep Barat mengenai demokrasi: empirisme rasional; tekanan atas individu; negara sebagai alat; kesukarelaan; hukum di belakang hukum; tekanan atas sarana-sarana; diskusi dan mufakat dalam hubungan antar manusia; dan persamaan hakiki semua orang.

EMPIRISME RASIONAL

Empirisme rasional mungkin adalah unsur tunggal yang paling penting dalam cara hidup bebas. Ia didasarkan atas kepercayaan akan akal budi dan akan kemampuan akal budi bukan saja untuk menguasai alam fisik tetapi juga hubungan manusia. Kaum dogmatis -- seperti kaum komunis dan fasis -- *tahu* apakah kebenaran itu; bagi kaum komunis konsep kelas adalah kebenaran akhir sedangkan bagi kaum fasis ras dan bangsa merupakan penyimpanan kebenaran terakhir. Karena kaum dogmatis begitu yakin bahwa mereka tahu, mereka tidak perlu mengadakan penelitian lebih lanjut; tujuannya ialah memperkuat apa yang telah diketahuinya, dan mereka menuduh barang siapa mempersoalkan pengetahuan mereka melakukan subversi intelektual. Hubungan psikologis dan historis antara dogmatis dalam filsafat dan otoriterisme dalam politik adalah jelas; kepastian mutlak mengenai pengetahuan membawa ke entusiasme fanatik dalam perasaan, yang pada gilirannya membawa ke penindasan intoleran dalam pemerintahan.

Sebaliknya empirisme, yang untuk pertama kalinya dikembangkan sepenuhnya oleh John Locke (1632-1704), didasarkan atas gagasan bahwa

seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman. Dalam konsepsi ini, kebenaran adalah tentatif, berubah-ubah, dan tunduk pada pengecekan dan verifikasi yang terus-menerus.

Karena sejarah ilmu fisika maupun gagasan sosial penuh kebenaran yang kemudian ternyata seluruhnya atau sebagian tidak benar, kaum empiris rasional tidak mau percaya, seperti kaum dogmatis percaya, bahwa umat manusia telah sampai atau akan pernah sampai pada jawaban-jawaban final. Salah satu di antara teka-teki yang paling paradoksal mengenai perluasan progresif pengetahuan ialah bahwa dengan meningkatnya pengertian dan pengetahuan kita mengenai suatu masalah atau bidang tertentu kesadaran akan ketidaktahuan kita meningkat lebih cepat. Banyak masalah yang dipecahkan dalam ilmu fisika maupun sosial menciptakan lebih banyak masalah baru daripada yang ada sebelumnya.

Diperlukan banyak pengetahuan dan penelitian untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Orang yang untuk pertama kalinya sadar akan ketidaktahuannya kiranya adalah, dalam evolusi gagasan manusia, ilmuwan yang pertama; karena sadar akan *apa yang tidak diketahuinya*, dia mulai berusaha mencari suatu jawaban. Tanpa "pemecahan" Newton terhadap masalah berat, tidak akan ada dunia baru fenomenon fisik yang dibuka oleh Einstein. Tanpa "pemecahan" masalah pemerintahan oleh metode demokratis di dunia modern, tidak akan ada Tocqueville yang menemukan dalam *Democracy in America*-nya (1835) dunia baru masalah-masalah politik yang diciptakan oleh pemecahan demokratis.

Dengan demikian kaum empiris rasional menganggap kebenaran, dalam studi alam maupun manusia, sebagai suatu proses tanpa akhir dan memandang pengetahuan kebenaran kini tidak lebih daripada suatu *probabilitas*, yang harus diubah kalau diketemukan fakta-fakta baru. Bertrand Russell menulis dalam *Philosophy and Politics*-nya bahwa orang liberal sejati tidak berkata "Ini benar" tetapi "Saya condong untuk mengira bahwa dalam keadaan sekarang ini pendapat ini kiranya pendapat yang paling baik."

Ilmu dan demokrasi juga sama-sama *menekankan prosedur, bagaimana* (bukan apa) jawaban-jawaban akan muncul sebagai hasil usaha mencari pengetahuan yang benar. Pembeneran pokok kebebasan menyatakan pendapat dalam ilmu maupun demokrasi adalah lebih luas daripada semata-mata kepuasan orang-orang akan oto-ekspresi dan oto-realisis, betapapun kriterium itu sendiri dapat dibela. Dalam ilmu, seluruh komunitas ilmiah bergantung pada, dan merasa berhak, atas pengumpulan dan komunikasi bebas semua data dan gagasan yang mungkin. Demikianpun komunitas politik demokrasi untuk eksistensinya bergantung pada kebebasan ekspresi sebanyak mungkin fakta dan pendapat sebelum keputusan diambil.

Secara ideal suatu badan legislatif dalam suatu demokrasi bertindak sebagai seorang hakim yang menjatuhkan putusannya setelah mendengar semua pihak yang mengajukan argumen-argumen yang bisa material atau imaterial, penting atau tidak penting. Kenyataannya badan legislatif yang paling tua -- parlemen Inggris -- mulai dan berfungsi selama abad-abad pertama eksistensinya sebagai suatu mahkamah agung: dan bahkan sekarang majelis tinggi parlemen -- House of Lords -- berfungsi sebagai mahkamah agung Inggris. Sampai sekarang semua legislatur demokratis mengikuti prosedur Inggris yang semula berkembang dalam kerangka kegiatan kehakiman.

Yang paling banyak membedakan suatu legislatur demokratis dari suatu legislatur totaliter dengan demikian bukanlah produk final, undang-undang apa dibuat dalam masing-masing lembaga, tetapi *prosedur* mana dianutnya. Terutama prosedur demokratis menuntut, sebagaimana prosedur kehakiman dan ilmiah, agar *semua pihak sengketa didengar*. Dari tuntutan prosedural dasar ini mengalir *kebebasan-kebebasan demokratis pokok*: kebebasan bicara, publikasi, berkumpul dan perkumpulan. Sebaliknya prosedur "parlementer" totaliter hanya membiarkan satu sisi, "garis pantai," untuk disampaikan. Kebenarannya telah di situ, sebelum debat atau diskusi apa pun -- *kalaupun* diadakan debat atau diskusi, karena sorak-sorai dan tepuk tangan sering mengambil tempatnya.

Kemungkinan besar bukan kebetulan bahwa empirisme rasional dan demokrasi berkembang secara simultan di Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Di Inggris misalnya John Locke, pendiri empirisme, masih merupakan eksponen liberalisme politik yang paling meyakinkan. Di Amerika Serikat empirisme merupakan mazhab pemikiran yang dominan dan mencapai puncaknya pada John Dewey (1859-1952), yang penerapan empirisme rasionalnya pada filsafat dan politik merupakan sumbangan pada warisan liberal Amerika yang menetap.

TEKANAN ATAS INDIVIDU

Tekanan atas individu secara tajam memisahkan demokrasi dari totaliterisme baik fasis maupun komunis. Di mata kaum demokrat, tiada lembaga sosial atau politik, entah suatu kelompok pramuka lokal, sebuah daerah partai, atau negara bagian yang mempunyai maksudnya sendiri selain *melayani dan membantu individu dalam menghayati hidup yang lebih penuh*.

Dalam doktrin totaliter, negara adalah majikan, individu pelayan. Hegel, bapak intelektual fasisme maupun komunisme, mengatakan dalam *Filsafat Hukum*-nya (1821) bahwa individu menemukan kebebasannya dalam mati un-

tuk negara. Hanya kalau individu mati untuk negara ia kehilangan bekas terakhir keanehan dan keunikan pribadi dan secara lengkap menjadi anggota negara.

Sebaliknya John Locke melihat esensi manusia yang tidak bisa dihancurkan dalam melawan negara, bukan dalam mematuhiya secara buta. Asas-asas liberal hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan dengan demikian merupakan lawan konsep otoriter kewarganegaraan sebagai kewajiban, disiplin, dan kematian untuk negara.

Thomas Jefferson, salah satu pendukung personalisme yang paling besar jamannya, mengatakan dalam sebuah surat kepada Kolonel William Stephen Smith, tertanggal 13 Nopember 1787, bahwa "pohon kebebasan harus dise-garkan dari waktu ke waktu dengan darah patriot dan tiran." Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat juga menyatakan bahwa hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan adalah di antara hak-hak manusia yang tidak dapat dipindahkan dan bahwa "apabila suatu bentuk pemerintahan menjadi penghancur tujuan-tujuan itu, adalah hak rakyat untuk mengganti atau menghapusnya, dan untuk membentuk pemerintah baru dan meletakkan dasarnya atas asas-asas semacam itu, dan mengorganisasi kekuasaannya dalam bentuk yang kepada mereka kemungkinan sangat besar akan tampak menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka."

Akar-akar historis personalisme adalah tiga: *pertama*, konsep Yahudi mengenai Tuhan membawa ke gagasan bahwa semua orang, sebagai anak-anak Tuhan, adalah saudara satu sama lain. *Kedua*, ajaran Kristen bahwa jiwa manusia tidak dapat dihancurkan mempertahankan bahwa ketidaksamaan sosial, ekonomi dan politik mana pun mungkin ada, semua orang mempunyai suatu persamaan dan keunikan spiritual yang tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan duniawi. *Ketiga*, dalam pandangan Stoa, satu-satunya asas tindakan yang memerintah segala sesuatu ialah *satu dengan dirinya sendiri*, mengenal diri sendiri, dan bertindak selaras dengan asas-asas dan tujuan-tujuan rasionalnya. Diri sejati manusia, menurut kaum Stoa, bukanlah daging atau tulang-tulangnya, tetapi daya yang menggunakannya, *akal budinya*, bagian manusia yang lebih dari lain-lainnya menjadi cirinya sebagai manusia.

Sudah barang tentu personalisme ini tidak pernah diterima sepenuhnya, dan kekuatan-kekuatan kontra totaliterisme selalu mengancamnya. Khususnya dewasa ini ancaman perang bom atom dan hidrogen yang bisa menghancurkan segala sesuatu membawa ke diperkuatnya sikap-sikap anti-individualis dan penekanan gagasan "marilah merapatkan barisan" dan bukan "biar setiap orang memutuskan sendiri apa yang baik dan buruk dan bertindak sesuai dengan itu."

TEORI NEGARA SEBAGAI ALAT

Teori tentang negara sebagai alat melihat negara sebagai suatu mekanisme yang harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Baik Plato maupun Aristoteles, pendiri teori politik Barat, memikirkan negara sebagai suatu entitas organis, yang mempunyai hidup dan tujuannya sendiri, yang lebih tinggi daripada tujuan individu. Plato dan Aristoteles memikirkan negara sebagai *harta moral tertinggi*, sumber nilai-nilai moral dan perkayaan spiritual individu.

Dari sudut pandangan agama Yahudi-Kristen teori instrumentalisme negara mengatakan bahwa nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia berkaitan dengan Tuhan dan bahwa tiada hukum duniawi yang bisa menghapus hukum Tuhan. *Fungsi negara ialah memelihara perdamaian dan ketertiban, agar orang-orang dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi.* Dari sudut pandangan rasional-humanis teori instrumentalisme negara mengukuhkan bahwa kemampuan individu untuk menggunakan akal budinya guna menemukan apa yang baik dan buruk adalah ujian terakhir kekuasaan politik dan bahwa oleh sebab itu *negara tidak dapat mengubah jahat menjadi baik* atau salah menjadi benar semata-mata karena memiliki sarana-sarana paksaan fisik.

Doktrin liberal menekankan masyarakat jauh lebih banyak daripada negara; dalam doktrin liberal yang klasik -- dan sebagian besar kini -- *masyarakat dianggap swasembada pada dasarnya, dan negara hanya harus turun tangan bila usaha-usaha sukarela masyarakat tidak mencukupi.*

Dengan demikian teori instrumentalitas negara menurunkan negara ke suatu kedudukan *subsidiar*. Selama orang-orang bisa hidup tanpa negara, prasangka liberal adalah terhadap negara, bahkan kalau negara bisa melakukan hal yang sama secara sedikit lebih baik.

Dalam negara totaliter, asumsinya selalu menguntungkan negara, karena negara dianggap maha tahu dan maha kuasa. Dengan demikian negara bukan saja menguasai dan mengorganisasi bidang-bidang sensitif ekonomi, pendidikan dan agama, tetapi bahkan pemain catur dan pelancong Minggu sore, karena negara tidak ingin membiarkan kegiatan mana pun kepada keputusan bebas warga negaranya.

KESUKARELAAN

Sebaliknya teori demokratis melihat dalam asas *kesukarelaan* (voluntarism) *darah hidup masyarakat itu sendiri.* Persekutuan (fellowship) dapat paling mendalam dialami dalam kelompok-kelompok sukarela yang kecil. Kelompok-kelompok serupa itu untuk pertama kalinya dibentuk di Inggris.

abad ke-17 atas dasar keagamaan, dan sampai sekarang di dunia berbahasa Inggris terdapat ribuan dan ribuan sekte keagamaan yang kecil ukurannya dan sama sekali sukarela sifatnya.

Kemudian asas perkumpulan sukarela diterapkan di bidang politik (partai-partai), pendidikan (sekolah swasta) dan ekonomi (serikat buruh dan perhimpunan majikan). Dalam amal, Palang Merah dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa masih kuatlah maksud untuk mempertahankan kegiatan sukarela. Bahkan di Inggris, yang mempunyai program-program kesehatan dan jaminan sosial nasional yang mencakup setiap orang dari buaian sampai liang lahat, ditekankan kembali arti organisasi sukarela dalam kesejahteraan sosial, yang melengkapi program pemerintah.

HUKUM DI BELAKANG HUKUM

Konsep *hukum di belakang hukum* secara langsung mengalir dari pandangan *federal* mengenai negara dan masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat dipikirkan sebagai suatu kumpulan bermacam-macam perhimpunan sukarela, dan negara itu sendiri dilihat sebagai suatu badan yang pada hakikatnya sukarela karena kekuasaannya berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah. Bilamana kekuasaan diorganisasi atas dasar federal, harus ada *hukum yang lebih tinggi* yang membatasi hubungan bagian-bagian antara mereka sendiri dan antara masing-masing bagian dan keseluruhan.

Dengan demikian demokrasi selalu menganut gagasan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat, antara pemerintah dan individu, akhirnya dibatasi oleh suatu *hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara*. Kenyataannya gagasan demokrasi di Inggris dan Amerika Serikat menganggap bahwa *hukum bukan produk negara tetapi mendahuluinya*. Hak atas hidup, kebebasan, milik dan pencarian kebahagiaan bukan hadiah negara kepada individu, melainkan mendahului negara. Fungsi negara sehubungan dengan hak dasar manusia ialah *melindungi dan membatasi hak-hak serupa itu*, bukan menciptakannya.

Khususnya di Amerika Serikat konsep hukum di belakang hukum tidak pernah ditantang sebagai landasan gagasan dan pengalaman politik Amerika. Deklarasi Kemerdekaan secara spesifik mengakuinya, dan Konstitusi juga mengakui bahwa tiada badan legislatif yang bisa membuat undang-undang tanpa proses yang diwajibkan atau undang-undang yang melanggar asas-asas akal budi yang pokok. Sudah barang tentu eksistensi Amerika Serikat adalah berkat penegasan bahwa di atas hukum yang berlaku waktu itu, yaitu hukum Inggris imperial, ada hukum yang lebih tinggi yang kepadanya kaum kolonis

Lawan-lawan pemerintah demokratis menuduh bahwa konsep hukum yang lebih tinggi ini, yang membuat pemerintah bergantung pada persetujuan rakyat yang diperintah, membuka pintu untuk pemberontakan dan anarki. Dalam *Two Treaties of Government* (1690)-nya, John Locke menjawab tuduhan ini dengan tiga argumen tangkisan. *Pertama*, John Locke mengakui bahwa teori demokratis pemerintahan menerima kemungkinan pemberontakan, tetapi menyangkal bahwa ia lebih banyak melakukannya daripada lain-lain teori mana pun. Bila rakyat dibuat menderita terlalu berat, mereka akan memberontak di bawah bentuk pemerintahan mana pun; sekali pun para gubernur "suci dan ilahi, yang berasal atau dikuasakan dari surga, anggaplah mereka menurut kesenangan anda, hal yang sama akan terjadi." *Kedua*, Locke mengatakan bahwa orang-orang tidak memberontak "pada setiap salah urus kecil dalam urusan negara," atau "untuk perkara-perkara yang kecil dan sementara," seperti ditegaskan oleh Deklarasi Kemerdekaan. *Ketiga*, dan di sini Locke bergerak dari pembelaan ke ofensif, pemerintahan dengan persetujuan yang digabungkan dengan hak untuk memberontak adalah "pagar yang paling baik terhadap pemberontakan."

Locke hanya bisa menduga pada tahun 1690 apakah argumen-argumennya akan dibenarkan oleh pengalaman, karena pada waktu itu demokrasi masih merupakan suatu hal hari depan. Namun pengalaman membuktikan bahwa dia melihat dengan tajam. Sistem pemerintahan Inggris dan Amerika, yang didasarkan atas pengakuan Locke-Jefferson atas hak rakyat untuk memberontak melawan penindasan, ternyata merupakan *sistem politik yang paling stabil dan berhasil* yang pernah dilihat di dunia, dan yang sama dapat dikatakan mengenai negeri-negeri (lebih kecil ukurannya tetapi sama besar dalam kemuliaan kebebasan) seperti Belanda, Swiss dan negara-negara Skandinavia. Sebaliknya, di mana hukum yang lebih tinggi itu ditolak atas nama hukum dan tertib, hasil politiknya ialah pembersihan berdarah, komplotan, makar dan kontra-makar, dan pergantian dengan kekerasan dari satu sikap ekstrim ke sikap ekstrim lain -- khususnya sejarah politik diktator fasis dan komunis.

TEKANAN ATAS SARANA

Tekanan atas sarana-sarana dalam kehidupan demokrasi didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan-tujuan tidak mempunyai eksistensi terpisah dari sarana-sarana tetapi secara terus-menerus dibentuk olehnya. Kaum totaliter menarik suatu perbedaan tajam antara tujuan dan sarana. Dalam cara dogmatis pemikirannya mereka mutlak pasti mengenai apakah tujuan-tujuan itu, dan dalam kepastian itu mereka tidak banyak memperhatikan sifat sarana. Jadi, golongan komunis percaya akan persaudaraan universal dan kerja sama sebagai tujuan mereka yang diakui secara resmi, namun mereka tidak menyadari bahwa sarana-sarana yang digunakan untuk mewujudkan harmonisasi

-- polisi rahasia, kamp-kamp kerja paksa "koreksional," kontrol pikiran, penyalahan, dan penindasan pendapat yang berbeda -- meningkatkan kebebasan dan penderitaan, dan bukan menguranginya.

Salah satu kesulitan dalam memisahkan sarana dan tujuan ialah kenyataan bahwa *dalam kebanyakan situasi praktis sarana adalah sekaligus tujuan*. Jadi, pendidikan bagi sementara adalah tujuan; untuk lain-lain orang sarana untuk suatu tujuan -- suatu gelar misalnya. Namun gelar itu sendiri bisa hanya merupakan suatu sarana untuk tujuan hidup yang lebih bahagia dan penuh, atau suatu pekerjaan yang lebih baik. Lagi, suatu pekerjaan yang lebih baik tidak mesti merupakan suatu tujuan pada dirinya sendiri; ia kiranya adalah sarana untuk suatu tujuan yang lebih tinggi, misalnya mengungkapkan suatu perasaan keahlian atau melayani masyarakat.

Kedudukan sentral sarana dalam masyarakat bebas tertanam kuat dalam pengalaman hidup mereka. Magna Charta, habeas corpus, dan peradilan juri, untuk hanya menyebutkan beberapa akar kebebasan di dunia berbahasa Inggris, mula-mula adalah *alat-alat prosedural, sarana-sarana*; dan sejarah kebebasan dapat dibatasi dengan baik sebagai sejarah prosedur. Dalam majelis-majelis perwakilan juga bukanlah produk legislatif yang membedakan suatu lembaga demokratis dari suatu lembaga non-demokratis, tetapi perbedaan prosedur. Dalam hal yang satu prosedur ditujukan pada *jaminan hak minoritas yang paling penuh dan wajar untuk didengar*; dalam hal yang lain, prosedur ditujukan untuk membungkam minoritas dan memancing volume sorak yang sekeras mungkin untuk si diktator.

Dewasa ini bahaya dalam masyarakat demokratis terletak dalam kemungkinan memudarnya kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan mengenai sarana-sarana adalah pokok perbedaan antara demokrasi dan totaliterisme. Dalam melawan suatu sistem totaliter seperti fasisme atau komunisme terdapat suatu kecenderungan alamiah untuk *mentru sarana-sarana mereka*, dan oleh sebab tendensinya alamiah, harus dilakukan usaha-usaha khusus untuk berjaga-jaga terhadapnya. Dalam membela demokrasi sementara orang bersedia menggunakan sarana-sarana yang akan merusak hal yang mereka bela itu sendiri.

MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Musyawarah dan mufakat adalah sarana-sarana yang digunakan demokrasi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan dan kepentingan. Menurut pandangan demokratis, karena tiada orang yang memiliki kebenaran mutlak, kedua pihak suatu argumen bisa memberikan sumbangan menuju jawaban yang sebaik mungkin dan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban itu ialah *mengalans semua bukti yang tersedia*.

110. Pemilih merdeka dalam suatu demokrasi merupakan tipe orang yang tidak bersedia mengikat dirinya tanpa syarat dengan satu partai, atau karena terlalu sedikit tahu (kurang sering) atau terlalu banyak mengenai politik, atau semata-mata karena -- apa pun tingkat informasi politiknya -- ia tidak mengharapkan terlalu banyak dari pemerintah. Dalam suatu negara totaliter tiada pemilih merdeka, hanya pengikut atau musuh cara berpikir yang berkuasa. Arti penting pemilih yang independen dapat dilihat dengan jelas dalam banyak pemilihan. Tahun 1952 Partai Republik memilih Jenderal Eisenhower atas Senator Taft sebagai calon presidennya, terutama karena daya tariknya yang lebih kuat di kalangan pemilih independen. Sebaliknya, kekalahan Goldwater dalam pemilihan presiden tahun 1964 oleh banyak orang dilihat sebagai akibat lemahnya daya tariknya di kalangan pemilih yang independen.

111. Dalam teori masyarakat demokratis, pemerintah mendapatkan "kekuasaan sah mereka dari persetujuan mereka yang diperintah" (Deklarasi Kemerdekaan Amerika), karena *negara tidak mempunyai alasan eksistensi selain melayani rakyat*. Kalau negara menjadi penindas dan mengabaikan hak-hak rakyat, maka teori demokratis, seperti dikemukakan di atas, bukan saja menjunjung tinggi hak melainkan juga kewajiban untuk memberontak terhadap pemerintah serupa itu.

112. Hak memberontak ini hanya bisa dituntut di mana metode-metode musyawarah dan mufakat diblokir oleh despotisme tiranik; di mana saluran-saluran diskusi terbuka, seperti dalam suatu negara dan masyarakat demokratis, tiada demokrat yang akan menuntut hak memberontak terhadap negara.

113. Orang komunis yang sekarang menuntut hak revolusi sebagai suatu privilese demokratis yang umum sama sekali memalsukan konsep ini untuk maksud-maksudnya sendiri. Dari sudut pandangan demokratis, *orang demokrat mempunyai hak moral dan kewajiban moral, untuk memberontak terhadap sistem totaliter, tetapi orang totaliter tidak mempunyai hak semacam itu terhadap sistem demokratis* (karena saluran-saluran diskusi dan mufakat terbuka).

PERSAMAAN HAKIKI SEMUA ORANG

114. *Persamaan hakiki semua orang* adalah suatu pasal doktrin dan policy demokratis yang sering dipahami secara salah. Tiada demokrat yang pernah mengatakan bahwa semua orang identik melainkan bahwa *dalam segi-segi dasar mereka sama*. Keunikan setiap orang itu sendiri menciptakan semacam persamaan yang penting dalam pandangan demokratis. Dari sudut pandangan

keagamaan tradisi Yahudi-Kristen *semua orang sama di depan Tuhan*; tantangan Tuhan terhadap setiap orang adalah sama, biarpun tanggapan orang-orang terhadapnya sangat berbeda-beda. Dari sudut pandangan rasionalis-humanis, semua orang sama-sama mempunyai, di atas perbedaan ras, kelamin, agama, kebangsaan, dan kelas, satu corak bersama; *kemampuan bernalar*. Dalam arti ini semua orang adalah warga dunia dan bukan warga suatu kelompok khusus, dan persamaan hakiki mereka berasal dari apa yang mereka miliki bersama, bukan dari apa yang memisahkan mereka.

Deklarasi Kemerdekaan menegaskan sejelas-jelasnya bahwa semua orang diciptakan sama, dalam arti bahwa mereka mempunyai hak-hak tak terpisahkan tertentu, seperti hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan. Persamaan yang diterima seorang pada kelahirannya, menurut teori demokratis, pada dasarnya bukan suatu hadiah tetapi suatu pinjaman, seolah-olah, suatu *peluang*, suatu *tantangan*. Kalimat Jefferson "pencarian kebahagiaan" secara mengagumkan menyatakan gagasan bahwa manusia tidak mempunyai hak atas kebahagiaan, melainkan hanya mempunyai hak untuk mengusahakan kebahagiaan, tanpa rintangan-rintangan yang tidak masuk akal.

Akan tetapi persamaan tidak berarti, seperti dituduhkan oleh Plato, "memberikan semacam persamaan kepada orang-orang yang sama maupun tidak sama." Lawannya adalah benar, dari sudut cita-cita demokrasi paling tidak. Dalam praktek tidaklah mudah mengetahui kapan orang-orang yang sama masih sama dan kapan mereka menjadi tidak sama. Jadi, untuk mengambil suatu ilustrasi, tafsir persamaan demokrasi yang paling umum ialah "persamaan kesempatan." Suatu kesulitan berat langsung muncul. Kalau semua orang dibekali bakat dan kemampuan yang sama, dan lahir dalam rumah yang sama, dan menerima pendidikan yang sama, memberi semua suatu persamaan kesempatan akan adil. Namun orang-orang berbeda dalam bakat bawaan dan bahkan lebih banyak dalam latar belakang dan pendidikan.

Tindakan legislatif tidak bisa menyamakan IQ penduduk, dan akan selalu ada perbedaan-perbedaan kemampuan, semangat, motivasi, tetapi *undang-undang dapat membuat persamaan kesempatan lebih nyata dengan berusaha menyamakan kondisi sebelum balapan dimulai*: pajak warisan yang dinaikkan mengurangi dampak kekayaan warisan, pajak pendapatan progresif lebih menguntungkan kelompok-kelompok pendapatan rendah, dan pendidikan cuma-cuma (dari TK sampai universitas) lebih menguntungkan yang miskin daripada yang kaya. Dengan perkataan lain, persamaan kesempatan, kalau membiarkan kemampuan saja beroperasi, cepat menciptakan dan mengabadikan ketidaksamaan. *Kebutuhan juga harus dipertimbangkan*; kebutuhan menambahkan asas efisiensi pada asas kebahagiaan.